

## Bank Kalimantan Selatan Komitmen Dukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Layanan Digital



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/379485/bank-kalsel-komitmen-dukung-peningkatan-pad-melalui-layanan-digital>

Bank Kalsel berkomitmen, senantiasa mendukung upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) bersama pemerintah kabupaten dan kota, dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui program pembayaran secara digital. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin pada rapat koordinasi dan evaluasi peningkatan PAD dalam Rapat Kerja Forum Komunikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah (FKPPD) se-Kalsel, bersama Pemprov Kalsel dan pemerintah kabupaten dan kota se Kalsel, yang berlangsung di Hotel TreePark Banjarmasin, berdasarkan rilis dari Bank Kalsel yang diterima Senin.

Melalui pembayaran secara digital ini, khususnya dengan channel-channel pembayaran digital Bank Kalsel, baik QRIS, Mobile Banking, Internet Bisnis Banking dan channel lainnya, diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai pembayaran retribusi hingga pajak untuk pemerintah daerah setempat. Kalau masyarakat semakin mudah melakukan pembayaran retribusi hingga pajak, diharapkan dapat berbanding lurus dengan peningkatan PAD. Dengan meningkatnya PAD maka tentunya pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di wilayah Kalsel dapat semakin bagus ke depannya.

Bank Kalsel juga berkomitmen untuk mendorong kabupaten dan kota di Provinsi Kalsel agar masuk dalam kategori digital, khususnya dari sisi pembayaran. Kita akan terus

dukung agar masuk kategori digital ini. Kami juga terus membenahi sistem pembayaran digital kami agar semakin cepat, mudah, aman dan nyaman sesuai dengan kebutuhan zaman. Kegiatan FKPPD yang diikuti oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah (BPPRD) kabupaten/kota se-Kalsel.

Dalam sambutannya, Bupati Banjar Saidi Mansyur menegaskan, pelaksanaan rapat kerja ini diharapkan dapat menyatukan pemahaman dalam upaya meningkatkan pendapatan untuk membangun daerah, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi kemakmuran masyarakat banua. Terus dikatakannya, antar daerah di Kalsel harus saling bersinergi dalam membangun kebersamaan termasuk dalam hal mengelola pendapatan.

Karena itulah harapannya dalam rapat ini kita bisa menemukan langkah strategis untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait pengelolaan pajak dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayahnya masing-masing.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/379485/bank-kalsel-komitmen-dukung-peningkatan-pad-melalui-layanan-digital>, 20 Juli 2023.
2. <https://www.beritaja.com/bank-kalsel-komitmen-dukung-peningkatan-pad-melalui-layanan-digital-beritaja-58751.html>, 20 Juli 2023.

#### **Catatan Berita:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sedangkan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- b. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Daerah yang dipungut Pemerintah Provinsi adalah PKB; BBNKB; PAB; PBBKB; PAP; Pajak Rokok; dan Opsen Pajak MBLB, sedangkan Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.
- c. Retribusi Daerah terbagi menjadi Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum, lebih lanjut terdiri dari pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Retribusi Jasa Umum dimaksud tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- d. Selanjutnya jenis pungutan yang tergolong Retribusi Jasa Usaha adalah: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sementara itu pungutan yang dilakukan terhadap kegiatan pemberian persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat.
- f. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan

dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.